

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PASCA PEMEKARAN PADA ENAM KABUPATEN DI PROVINSI ACEH

Syata Maulida^{1*}, Vivi Silvia²

- 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, email : syata.maganx@gmail.com
- 2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, email : vivisilvia24@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to see and analyze the impact of area division against Human Development Index (HDI) in six districts of the division districts in Aceh Province. Multiple linear analysis model is used in this research with panel data of 2007-2013. Dummy variable is used to see comparison between district division and its origin district. The result of study show that purchasing power of people and the number of children born live variables influence positively and significantly against the figure of Human Development Index (HDI). While the highest educational attainment variable does not influence significantly against Human Development Index (HDI). Based on the result of study conducted, there is still imbalance in the supply and service to access of social needs such as education and healthy. The research recommends the government to improve facilities and infrastructure for education and healthy, such as number of schools, teachers, hospitals, medical personnels, and midwives to increase people welfares.

Keywords : *Human Development Index (HDI), Education, Healthy, Aceh Division.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada enam kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Aceh. Model penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan data panel dari tahun 2007-2013. Variabel dummy digunakan untuk melihat perbandingan kabupaten pemekaran dengan kabupaten induknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemampuan daya beli masyarakat dan jumlah anak lahir hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih adanya ketimpangan dalam penyediaan dan pelayanan terhadap akses kebutuhan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana bagi pendidikan dan kesehatan, seperti jumlah sekolah, tenaga pendidik, puskesmas, tenaga medis, bidan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan, Kesehatan, Pemekaran Aceh.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Demikian pula dengan Indonesia, ketika terjadi perubahan sosial-politik yang besar pada tahun 1997/1998 maka desentralisasi dan otonomi daerah menjadi alternatif jalan

keluarnya. Hal ini ditegaskan melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan salah satu tonggak reformasi pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan dimungkinkannya pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten-kota. Alasan dasar pemekaran daerah antara lain guna menciptakan kemandirian dan mempercepat pembangunan daerah, serta sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bappenas, 2008:1).

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, manusia selalu menjadi sasaran dari pembangunan suatu bangsa. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat yang menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar masyarakat dapat teratasi. Masalah-masalah tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf (Kacaribu, 2013:1).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004 yang merupakan publikasi bersama BPS, Bappenas, dan UNDP disebutkan bahwa salah satu tugas pembangunan yang terpenting adalah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pembangunan manusia (Evianto, 2010).

Indeks pembangunan manusia (IPM) mencakup unsur analisis yang meliputi variabel ekonomi dan non ekonomi. Variabel non ekonomi diukur dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat sedangkan variabel ekonomi diukur dari pendapatan yang menunjukkan daya beli masyarakat. maka dengan asumsi ini kabupaten/kota dengan nilai IPM masih rendah dianggap tingkat kesejahteraan penduduk daerah tersebut masih rendah, sehingga perlu penanganan khusus untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Singkil, dan Kabupaten Gayo Lues merupakan enam kabupaten dari Provinsi Aceh. Keenam kabupaten tersebut terbentuk dari hasil pemekaran dari kabupaten induknya. Kabupaten Bireuen merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie Jaya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Pidie. Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Jaya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Singkil merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Gayo Lues merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten Hasil Pemekaran di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aceh Singkil	68,12	68,73	68,58	68,98	69,37	69,79
Bireuen	72,60	72,88	73,07	73,38	73,70	74,03
Gayo Lues	67,17	67,71	67,86	68,22	68,54	69,09
Nagan Raya	68,47	68,88	69,18	69,68	70,64	71,50
Aceh Jaya	68,94	69,40	69,63	69,99	70,35	71,00
Pidie Jaya	71,23	71,71	72,38	72,82	73,13	73,69

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2014

Tabel 1 menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada enam kabupaten tersebut mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Kabupaten Bireuen merupakan kabupaten yang memiliki angka IPM tertinggi sebesar 74,03 persen. Sedangkan Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang memiliki IPM terendah sebesar 69,09 persen.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun, otonomi daerah juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki secara optimal. Dalam mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk diidentifikasi, dirumuskan, dan dipecahkan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan daerah tersebut dalam perspektif negara bangsa. Bukan sebaliknya, seluruh persoalan harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali persoalan-persoalan tertentu yang dapat ditangani oleh daerah (Basri, 2002: 176-177).

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang pemerintahan pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah yang semula bersifat sentralisasi sekarang berubah menjadi otonomi (desentralisasi) dimana pemerintah daerah memberikan wewenang yang lebih besar dalam mengurus pemerintahan dan mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas pembangunan di seluruh daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah yang bersangkutan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat (Sjafrizal, 2012:272).

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan (2009:3), desentralisasi fiskal merupakan kebijakan penting dan strategis. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik dapat mendukung terlaksananya tujuan otonomi daerah dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah sebagai konsekuensi logis otonomi daerah.

Konsep Pengembangan Wilayah dan Pemekaran Daerah

Pengembangan wilayah (*regional development*) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari rendahnya pendapatan per kapita. Rendahnya pendapatan per kapita sebagai akibat rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh pembentukan modal yang rendah. Oleh karena itu, pengembangan wilayah diperlukan untuk mensejahterakan wilayah itu sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah tersebut (Adisasmita, 2015:15).

Pemekaran wilayah adalah pemecahan atau pemisahan diri suatu daerah dengan wilayah induknya sebagai daerah otonom baru untuk dapat berdiri sendiri dan menjadi daerah yang mandiri dimana syarat dan ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah (Ansori dan Roekminiati, 2014:187).

Ratnawati (2009:47) berpendapat bahwa pemekaran wilayah di Indonesia secara besar-besaran sehingga berubah menjadi semacam bisnis atau industri, pemekaran saat ini tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif teoritis seperti yang tertera dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi lokal,

memaksimalkan akses publik pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefisien mungkin.

Teori Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses yang memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Pilihan yang terpenting adalah berumur panjang dan sehat untuk berilmupengetahuan serta mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (Bappenas, 2001:70). Alternatif lain dari strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai *people contered* atau *putting people first* (Korten dalam Kuncoro, 2006). Artinya manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan dan kapasitas manusia merupakan sumberdaya yang paling penting. Dimensi pembangunan seperti ini jelah lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Pendapatan manusia sebagai subjek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.

Menurut Schultz dalam Jhingan (2007:414), ada lima cara pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1. Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan, stamina, dan tenaga serta vitalitas rakyat
2. Latihan jabatan, termasuk magang yang diorganisasikan oleh perusahaan
3. Pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi
4. Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstensi khususnya pada pertanian
5. Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia (BPS, 2013:9).

Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan usia harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara setimbang dan rata-rata lama sekolah, dan standar kehidupan (*standar of living*) yang diukur dengan pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli untuk mencerminkan biaya hidup untuk memenuhi utilitas marjinal yang semakin menurun dari pendapatan (Todaro dan Smith, 2006:73-75).

Mailendra (2009:16) paradigma pembangunan manusia terdiri empat komponen utama, yaitu:

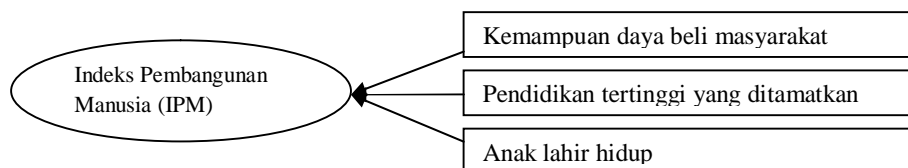
1. Produktifitas, masyarakat harus meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah.
2. Ekuitas, masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.
3. Kesenambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang.
4. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

BPS (2013:10-11) Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur nilai indeks pembangunan manusia, yaitu:

1. Indikator kesehatan diukur dengan angka harapan hidup. Angka Harapan Hidup ketika lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup (AHH) suatu masyarakat mengindikasikan tingginya derajat kesehatan masyarakat tersebut dapat disebabkan oleh tenaga medis dan sarana kesehatan seperti jumlah dokter dan jumlah puskesmas.
2. Indikator pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun keatas. Rendahnya Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya pengajar, dan biaya pendidikan yang mahal dan terkait dengan kemiskinan.
3. Indikator pendapatan diukur dengan kemampuan daya beli penduduk. Kemampuan Daya Beli Penduduk atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung IPM. Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, penghitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang kemudian disesuaikan.

Tujuan utama dari pembangunan manusia yaitu untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Hal tersebut tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebebasan memilih apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan menjalani hidup. Oleh karena itu manusia harus bebas untuk melakukan apa yang menjadi pilihannya dalam suatu sistem yang berfungsi dengan baik (Bappenas dan UNDP, 2001).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata jumlah anak lahir hidup, dan kemampuan daya beli masyarakat diduga variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran wilayah terhadap indeks pembangunan manusia pada enam kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Aceh serta membandingkan dengan kabupaten induknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia sebagai variabel terikat, serta pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kemampuan daya beli masyarakat, anak lahir hidup sebagai variabel bebas.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber BPS, Bappeda Aceh, dan instansi terkait. Penelitian ini menggunakan data panel (*pooled data*) yaitu menggabungkan data *cross-section* dan data *time series*. Data *time series* yang digunakan dari tahun 2007 sampai 2013. Atas enam kabupaten hasil pemekaran yaitu Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Singkil, dan Gayo Lues.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Model analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan menggunakan variabel dummy untuk melihat dampak pemekaran dan membandingkan kabupaten pemekaran dengan kabupaten induk. Regresi linier berganda digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh perubahan dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat (Gujarati dalam Syechalad, dkk, 2013:36). Secara umum analisis linier berganda yang ditunjukkan dalam persamaan berikut (Sumodiningrat, 2007:172)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Tranformasi model:

$$IPM = \alpha + \beta_1 KDBM + \beta_2 PT + \beta_3 ALH + D + \epsilon \dots \dots \dots (2)$$

D= 0, untuk kabupaten induk
 D=1, untuk kabupaten hasil pemekaran

Keterangan :

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi
- KDBM = Kemampuan Daya Beli Masyarakat
- PT = Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
- ALH = Rata-rata anak lahir hidup
- D = Variabel dummy
- ϵ = *Error term*

Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Indeks pembangunan manusia adalah angka indeks pembangunan manusia pada enam kabupaten hasil pemekaran yang diukur dalam persen.
2. Kemampuan daya beli masyarakat adalah tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk pada enam kabupaten hasil pemekaran yang diukur dalam ribu rupiah.
3. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang yang ditandai dengan sertifikat/ijazah yang diukur dalam persen.
4. Rata-rata anak lahir hidup adalah banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama reproduksinya yang diukur dalam persen.
5. Variabel dummy, nilai 0 untuk kabupaten induk dan nilai 1 untuk kabupaten pemekaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model

Untuk mengestimasi menggunakan data panel, terdapat tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Models*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Pendekatan dengan metode panel di uji kembali dengan Uji F (uji chow) dan Uji Hausman serta Uji Lagrange Multiplier untuk melihat model manakah yang lebih baik dan tepat untuk digunakan. Hasil estimasi pendekatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pengujian model untuk analisis indeks pembangunan manusia pasca pemekaran.

Mod el	Variabel	CEM		FEM		REM	
		<i>B</i>	<i>Prob</i>	<i>B</i>	<i>Prob</i>	β	<i>Prob</i>
I	KDBM	0,038762	0,0010	0,121714	0,0000	0,118474	0,0000
	PT	0,338950	0,0000	0,015303	0,2497	0,027135	0,0402
	ALH	-					
		0,105376	0,0018	0,33590	0,0017	0,029671	0,0048
	DUMMY	0,000019	0,1082	0,0000015	0,6656	0,0000052	0,5629
	C	4199,335		-406,1217		-227,4402	
	R ²	0,730036		0,992233		0,944692	
	Prob F	0,000000		0,000000		0,000000	
	stat						

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 7 (2016).

Tabel 2 hasil estimasi untuk pengujian model analisis indeks pembangunan manusia pasca pemekaran adalah *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* memiliki nilai p-value lebih kecil dari $\alpha = 5$ persen ($<0,05$). Namun masih perlu dilakukan pengujian dalam pemilihan model yang lebih tepat lagi, yaitu dengan menggunakan Uji Chow yang bertujuan untuk memilihh antara *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model* dan Uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect*.

Uji Chow

Chow test (Uji Chow) adalah pengujian untuk menentukan model apakah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel.

Tabel 3. Hasil uji chow untuk indeks pembangunan manusia pasca pemekaran

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
--------------	-----------	------	-------

Cross-section F	209.296618	(10,62)	0.0000
Cross-section Chi-square	273.226486	10	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 7 (2016)

Tabel 3 memperlihatkan uji chow dilakukan untuk memilih model mana yang terbaik, apakah *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.

H0 : *Common Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Karena nilai prob chi square $0,0000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H0 ditolak H1 diterima, artinya *Fixed Effect Model* yang lebih baik digunakan dari pada *Common Effect Model*.

Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian statistik sebagai pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*.

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model manakah yang terbaik, apakah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*.

H0 : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 4 nilai prob chi square $0,0000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka H0 ditolak, yang artinya *Fixed Effect Model* lebih baik dari *Random Effect Model*. Hasil yang konsisten (kedua uji membuktikan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model yang tepat digunakan) maka tidak perlu lagi dilakukan uji lanjutan berupa Uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel 4. Hasil uji hausman untuk indeks pembangunan pasca pemekaran

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.818354	4	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 7 (2016)

Hasil Regres

Tabel 5 memperlihatkan hasil estimasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi yang digunakan dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan nilai R^2 sebesar 0,9922 yang artinya 99,22 persen variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dan 0,87 dijelaskan oleh variabel lain.

Koefisien kemampuan daya beli masyarakat (KDBM) 0,121714, menjelaskan bahwa setiap meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat dalam satuan unit, maka akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia sebesar 0,1217 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Bila dilihat dari nilai t hitung sebesar koefisien 1 (KDBM) $28,374 > 1,666$, ini berarti kemampuan daya beli masyarakat (KDBM) berpengaruh signifikan terhadap angka indeks pembangunan manusia pada enam kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Aceh.

Koefisien jumlah anak lahir hidup (ALH) 0,033590, menjelaskan bahwa setiap meningkatnya anak yang lahir hidup sebesar satu persen, maka akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia sebesar 0,033590 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Bila dilihat dari nilai t hitung variabel koefisien 2 (ALH) $3,2748 > 1,666$, ini berarti bahwa jumlah anak

lahir hidup berpengaruh signifikan terhadap angka indeks pembangunan manusia pada enam kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Aceh.

Koefisien pendidikan tertinggi yang ditamatkan (PT) 0,015303, menjelaskan bahwa setiap meningkatnya pendidikan yang ditamatkan sebesar satu persen, maka akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia sebesar 0,015303 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Bila dilihat dari t hitung variabel sebesar $1,1618 < 1,666$, ini berarti pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak berpengaruh signifikan terhadap angka indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan masyarakat daerah di Provinsi Aceh hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD). Masyarakat tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa variabel dummy mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Bila dilihat dari t hitung variabel koefisien 4 (dummy) $0,434222 < 1,666$ menunjukkan bahwa variabel dummy tidak berpengaruh signifikan terhadap angka indeks pembangunan manusia pada enam kabupaten hasil pemekaran. Disebabkan keadaan demografis, geografis, infrastruktur, dan kemajuan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumberdaya (manusia dan alam) yang berbeda. Perbedaan kinerja pemabangunan antar daerah selanjutnya akan menyebabkan kesenjangan dalam kemajuan dan tingkat kesejahteraan antar daerah.

Tabel 5. Hasil estimasi *fixed effect model*

Variabel	IPM			
Dependen				
Variabel Independen	Coeficient	Std. Error	T-Statistic	Probabilitas
C	-406,1217	242,3685	-1,675637	0,0988
KDBM	0,121714	0,004290	28,37476	0,0000
PT	0,015303	0,013171	1,161861	0,2497
ALH	0,033590	0,010257	3,274877	0,0017
DUMMY	0,0000015	0,0000065	0,434222	0,6656
R ²	= 0,9922			
Adj. R ²	= 0,9904			
F Stat	= 565,7433			
Prob. F Stat	= 0,000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 7 (2016)

Uji Secara Simultan

Uji F atau uji secara simultan adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi atau tidak terhadap variabel terikat.

Pengambilan keputusan :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P \text{ value (nilai signifikansi)} > 0,05$ maka H_0 sditerima (H_a ditolak)
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P \text{ value (nilai signifikansi)} < 0,05$ maka H_a diterima (H_0 ditolak)

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai Pvalue F (0,0000) $< 0,05$, karena nilai signifikan uji F $<$ dari nilai 0,05 maka h_0 ditolak, artinya variabel independen (KDBM, PT, dan ALH) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (IPM).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi panel data, kemampuan daya beli masyarakat dan jumlah anak lahir hidup berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena mayoritas masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sekolah dasar (SD). Variabel kemampuan daya beli masyarakat mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap indeks pembangunan manusia, yaitu sebesar 0,121714. Setelah dilakukan pemekaran, kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie Jaya ternyata berhasil meraih nilai Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi dari kabupaten induknya. Sedangkan Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Singkil, dan Gayo Lues tidak berhasil meraih nilai indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi dari kabupaten induknya.

Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana bagi pendidikan dan kesehatan seperti jumlah sekolah, tenaga pendidik yang berkualitas. Serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dengan cara peningkatan jumlah puskesmas, tenaga bidan desa dengan standar pendidikan minimal DIII.
2. Kemampuan daya beli masyarakat merupakan kunci utama dalam peningkatan pembangunan. Maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

DAFTAR PUSTAKA

Bibliography

- Adisasmita, R. (2015). *Analisis Pembangunan Wilayah: Kepulauan, Kelautan, Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Archipelogo Dan Semeja*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ansori, A., & Roekminiati, S. (2014). Evaluasi Dampak Pemekarana Kecamatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XI (2), 181-198.
- Bappenas, & UNDP. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Jakarta: BRIDGE.
- BPS. (2013). *Indeks Pembangunan Manusia 2013*. Katalog BPS.
- BPS, Bappenas. UNDP. (2001). *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2001*. Jakarta.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. (2009). *Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2009, Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta.
- Evianto, Evan. (2010). *Analisis Disparitas Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaiannya*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Faisal, B. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jhingan, M. L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kacaribu, Rosinta. Dewi. (2013). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Papua*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Keempat*. UPP STIM YKPN.
- Mailendra, Fitra. (2009). *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ratnawati, T. (2009). *Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Pt. Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2007). *Ekonometrika Pengantar Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Syechalad, Moch. Nur., Hamzah, Abu. Bakar., & Mauriza, Sazli. (2013). Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 29-43.
- Todarol, Michael P; Smith, Stephen C;. (2006). *Ekonomi Pembangunan Edisi kesembilan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.